

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PTM DALAM MENDUKUNG *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* (GUG) PADA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DI SULAWESI SELATAN

Asrijal Bintang¹⁾ A. Ifayani Haanurat²⁾ Andi Rustam³⁾

¹⁾Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
email: asrijal.mm@gmail.com

²⁾Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
email: ifayani.haanurat@unismuh.ac.id

³⁾Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
email: andirust99@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of financial management in PTM, the application of GUG in financial management in PTM, and the efforts of PTM in implementing GUG in accordance with the rules / guidelines for financial management of the Higher Education Council of PP Muhammadiyah. This research uses qualitative research. The research object used was the financial statements of Muhammadiyah Universities (PTM) in South Sulawesi with a sample size of 5 PTMs. The instrument used in this study was the interview with the informant, then the answers from the informants were analyzed and described descriptively. The results showed that Muhammadiyah Higher Education (PTM) in South Sulawesi had implemented a financial management system based on the management guidelines for the Muhammadiyah Higher Education Council, Muhammadiyah Higher Education (PTM) in South Sulawesi had implemented Good University Governance principles, namely in terms of financial management. Regarding transparency and accountability, Muhammadiyah Higher Education (PTM) in South Sulawesi has made maximum efforts to apply the principles of Good University Governance which are adjusted to the financial management guidelines issued by the PP Muhammadiyah Dikti Council for Research and Development.

Keywords: Financial Management, Good University Governance (GUG)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan di PTM, penerapan GUG dalam pengelolaan keuangan di PTM, dan upaya PTM dalam menerapkan GUG sesuai aturan/pedoman pengelolaan keuangan Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Objek Penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se Sulawesi Selatan dengan jumlah sampel PTM yaitu 5 PTM. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan selanjutnya jawaban dari informan dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan pedoman pengelolaan Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yakni dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah memiliki upaya yang maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yang disesuaikan dengan pedoman pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, *Good University Governance* (GUG)

1. PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang bernafaskan islam tentunya bergerak dalam segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki amal usaha yang bergerak dalam berbagai bidang. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tatanan sosial dan pendidikan masyarakat

yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Sebagai sebuah wadah besar, Muhammadiyah tidak bisa dipungkiri harus memiliki amal usaha yang besar untuk menopang keberlangsungan hidup jalannya organisasi. Pengelolaan dana yang besar yang dihimpun melalui pembayaran pembiayaan mahasiswa maka dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik.

Pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel menjadi tujuan utama perguruan tinggi. Namun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya mata anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel. Berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi, ini menjadi satu hal yang membutuhkan solusi yang benar dan cepat.

Sistem pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah diatur oleh Majelis Pendidikan Tinggi penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam aturan sistem tersebut dijelaskan secara jelas sistem pengelolaan keuangan yang benar.

Konsep tersebut berwujud *Good University Governance* (GUG) atau tata kelola yang baik pada Perguruan Tinggi atau Universitas. Slamet (2005) mengungkapkan bahwa *good governance* memerlukan adanya otonomi yang mencukupi agar dapat melaksanakan governance dalam tiga aspek kelembagaan Perguruan Tinggi, yaitu kebijakan, akademi dan administratif.

Implementasi GUG merujuk implementasi *good governance* yang didasari oleh *Agency Theory*. Implementasi *good governance* timbul sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) mencerminkan kesuksesan perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing pada dunia global.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-fisiologis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan keseimbangan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

PTM berfungsi sebagai *centre of excellence within the region* (*uswah hasanah, pusat keunggulan*) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Hal tersebut menjadi cerminan bahwa pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi muhammadiyah terindikasi belum menunjukkan tata kelola yang baik atau dalam arti lain belum ada indikasi pelaksanaan *Good University Governance*. Beberapa indikator atau konsep GUG adalah Transparansi, Akuntabilitas, partisipasi, indicator itulah yang akan menjadi focus penelitian. Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik butuh penguatan dasar, untuk mengetahui sejauh mana setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki pengelolaan yang sesuai sistem pengelolaan *Good University Governace*.

Transparansi adalah ketersediaan informasi secara bebas dan dapat diakses langsung oleh masyarakat luas. Informasi yang diakses tersebut adalah informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, informasi tersebut harus dalam bentuk median yang mudah dipahami.

Akuntabilitas dalam konsep GUG adalah berkaitan dengan tanggungjawab atas manajemen perguruan tinggi terhadap pihak pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan *good university governance* dalam organisasi perguruan tinggi yang saling tumpang tindih sehingga sulit untuk mengidentifikasi tujuan strategis organisasi secara tepat.

Partisipasi merupakan kunci dari *good university governance*. Partisipasi dapat berbentuk langsung maupun melalui institusi perwakilan. Konsep ini mempunyai makna, bahwa perguruan tinggi harus memberikan informatif dan terorganisir. Perguruan tinggi juga dituntut untuk mempunyai kebebasan dalam berasosiasi dan berekspresi dalam menentukan kebijakan, sejauh kebijakan tersebut tidak menyalahi peraturan pemerintah.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah diberikan buku pedoman pengelolaan keuangan dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang isinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebagaimana yang ada dalam *Good University Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi yang telah dijelaskan di atas. Indikator GUG tersebut merupakan fokus penelitian ini. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan maksud ingin memastikan bahwa buku pedoman tersebut diterapkan pada PTM di Sulawesi Selatan khususnya di PTM yang menjadi lokasi penelitian. Penerapan tersebut tentunya akan menjadi indikator bahwa PTM di Sulawesi Selatan telah mendukung dan menerapkan *Good University Governance* atau tata kelola keuangan yang baik di Perguruan Tingginya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan di PTM.
- Untuk mengetahui penerapan GUG dalam pengelolaan keuangan di PTM.
- Untuk mengetahui upaya PTM dalam menerapkan GUG sesuai aturan/pedoman pengelolaan keuangan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut Brouwers and Koetzier (2015) kemampuan untuk menjamin ketersediaan keuangan untuk ditempatkan dalam suatu tujuan, agar dapat menutup biaya modalnya, dan ditempatkan dalam suatu investasi yang dapat mengembalikan dana awalnya.

Manajemen keuangan merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu manajemen Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, manajemen keuangan perguruan tinggi pada dasarnya merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, sehingga untuk bidang ini perlu penanganan yang serius, agar dicapai suatu pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian manajemen keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting di samping fungsi operasional lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen keuangan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan perusahaan yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah.

b. Prinsip-prinsip Keuangan

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan bahwa Manajemen keuangan Perguruan Tinggi perlu memerhatikan sejumlah prinsip di dalam manajemen keuangan. Di dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public. Di samping itu, prinsip efektifitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip di dalam manajemen keuangan, yaitu:

1) Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di Perguruan tinggi.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang Perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan

dan peraturan yang berlaku maka pihak Perguruan tinggi membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

3) Efektifitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes* nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Muhammad Mustari : 2014)

4) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*out put*) atau antara daya dan hasil.

c. Tujuan Manajemen Keuangan

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan Perguruan tinggi dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program Perguruan tinggi secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan Perguruan tinggi.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan Perguruan tinggi.
- Meminimalkan penyalahgunaan anggaran Perguruan tinggi

d. Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus ke luar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perseorangan) dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Safir Senduk (2009) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan ini adalah agar kita terhindar dari kondisi lebu banyak hutang daripada pemasukan.

Pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan keuangan agar mutu dari lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan.

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan maksudnya bahwa sebagian dana operasional dalam penyelenggaraan perguruan tinggi diperoleh dari masyarakat, sehingga penggunaan dana itu perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah usaha yang terkait dengan kepercayaan, karena itu kepercayaan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini meliputi pertanggungjawaban fisik dan non fisik. Fisik meliputi bangunan apa saja yang dimiliki, peralatan apa saja yang telah dipunyai untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik untuk mahasiswa maupun sivitas akademika yang lain. Non fisik meliputi pengetahuan, keterampilan, dan ilmu apa saja yang telah diperoleh lulusannya, serta hasil yang didikan lainnya berupa moral, nilai-nilai, budaya, sikap emosi, motivasi dan watak lulusan Hasil ini dapat dilihat setelah mahasiswa lulus dan terjun ke masyarakat sebagai *outcome*.

Untuk menunjukkan akuntabilitas, perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta perlu membuat laporan berkala tentang penyelenggaraan serta penggunaan dana yang diperolehnya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada pemberi anggaran baik itu pemerintah maupun masyarakat, dan dalam hal Perguruan Tinggi Swasta kepada Yayasan Penyelenggara pendidikan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan.

e. Buku Panduan Sistem Pengelolaan Keuangan PTM

Sistem perencanaan dan penyusunan anggaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adalah sistem yang digunakan dalam rangka perumusan perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama satu tahun. Desain sistem perencanaan PTM menggunakan sistem perencanaan strategis yang diikuti dengan sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja. Sistem perencanaan strategis merupakan sistem perencanaan jangka panjang yang diuraikan menjadi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang tidak hanya memfokuskan pada bagaimana mengalokasikan sumber daya (input) namun juga memfokuskan pada pencapaian target kinerja baik output maupun outcome. Anggaran kinerja merupakan anggaran yang dapat dinilai kinerjanya baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.

Anggaran Kinerja Perguruan Tinggi Muhammadiyah disusun berbasis aktivitas dan bersifat budgeter. Anggaran bersifat budgeter (sebagai lawan kata non-budgeter) merupakan anggaran yang bersifat terencana dan tertulis atau tercatat.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyusun dan menerbitkan buku panduan Sistem Pengelolaan Keuangan untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan diberlakukan secara nasional. Buku panduan Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan PTM agar Transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau sesuai dengan standar tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).

Bagi Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penerbitan pedoman ini merupakan tonggak penting menuju PTM yang bertata kelola yang baik, Islami sebagaimana misi persyarikatan.

Implementasi Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan ini akan efektif apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari level kebijakan sampai tingkat teknis. Oleh karena itu secara bersama-sama Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus mengusahakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di masing-masing perguruan tinggi. Piranti lain yang dibutuhkan untuk efektivitas implementasi pedoman ini adalah sistem informasi elektronik atau perangkat lunak yang mendukung yang juga akan dikembangkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah seiring dengan meningkatnya permintaan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).

f. Good University Governance

Defenisi Good Governance

Konsep Governance (tata kelola) telah semakin diakui atau dikenal sebagai komponen penting terhadap pembangunan berkelanjutan dan berkedilan. Berbagai pihak mendefinisikan Governance dengan berbagai konteks, merujuk Edwards (2000) menyatakan bahwa governance adalah tentang bagaimana sebuah organisasi mengarahkan dirinya sendiri, proses, dan struktur yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Governance sangat krusial berkaitan dengan bagaimana organisasi berhubungan satu sama lain dan kepada para stakeholders-nya.

Selain itu, dalam definisi bebas, governance adalah tindakan pemerintah, yang berkaitan dengan keputusan dalam menentukan harapan, memberikan kekuatan dan memverifikasi kinerjanya (Wikipedia). Ada juga yang mendefinisikan sebagai cara di mana kekuasaan melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan negara (*European Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 27 No.1 2013).

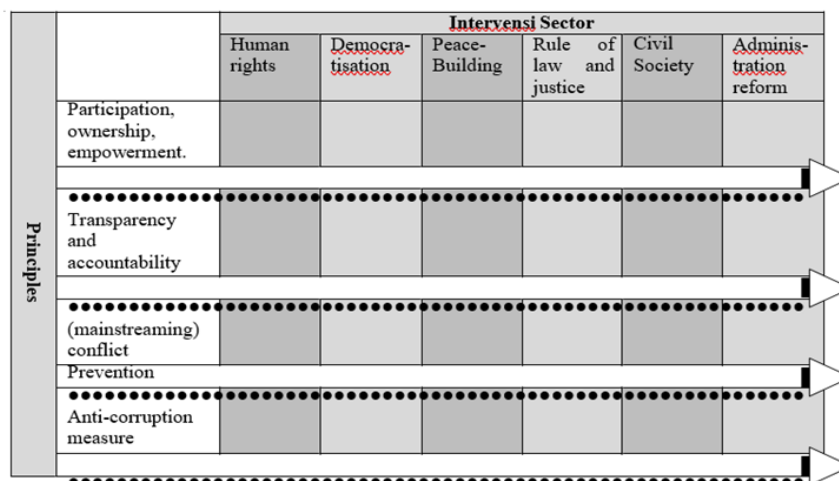
Secara etimologis, kata *governance* (tata kelola, tata pamong) berasal dari bahasa Perancis kuno "*gouvernance*" yang berarti *control* dan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali/*the state of being governed* (Syakhroza, 2005), atau dari bahasa Latin "*gubernare*" atau dari bahasa Yunani "*kybernan*" yang berarti *to steer, guide* atau *govern* (Iqbal dan Lewis, 2009). Governance merujuk pada semua proses pemerintahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasar atau jaringan, baik melalui keluarga, suku, organisasi formal atau informal atau wilayah dan baik melalui hukum, norma-norma, kekuasaan atau bahasa (Wikipedia.com). Governance adalah

sebuah konsep yang *highly contextual* yang mana teori dan definisinya tergantung pada konteksnya (Carrington dkk, 2008, www.iog.com, 2011), sehingga mempunyai terminologi yang bermacam-macam misalnya *monetary governance, economic governance, public governance, corporate governance* (Iqbal dan Lewis, 2009).

Good Governance (GG) adalah sesuatu yang berbeda, GG adalah konsep partisipatif, transparan dan akuntabel, ia juga menyangkut efektifitas dan keadilan serta mengedepankan aturan hukum yang jelas (European Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 27 No.1 2013). Merujuk dokumen kebijakan Austrian bahwa GG adalah bentuk manajemen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber ekonomi dan keuangan dengan maksud tercapainya keadilan dan pengembangan berkelanjutan (Federal Ministry, 2011). Dalam perspektif sebuah disiplin tata kelola merupakan model teoritis dari negara ideal dan bagaimana cara menjalankannya secara tepat. Berdasarkan perspektif ini semua model tata kelola dipandang berakar dari kerangka konseptual yang sama. Selanjutnya dalam perspektif *checks and balances*, tata kelola merupakan proses delegasi wewenang untuk pengambilan keputusan. Proses delegasi membutuhkan adanya *checks and balances* terhadap otoritas yang diberi wewenang untuk membuat keputusan. Dalam perspektif pengambilan keputusan, tata kelola terkait dengan efektifitas keputusan yang dibuat (Iqbal dan Lewis, 2009). Ketika terkait dengan efektifitas pembuatan keputusan tata kelola merupakan *structure of relationships that bring about organisational coherence, authorise policies, plans and decisions, and account for their probity, responsiveness and cost- effectiveness* (Gallagher 2001:1 dalam Cumming dkk, 2007).

Struktur dalam teori organisasi bisa diartikan sebagai pola koordinasi dan pengendalian, aliran kerja, otoritas dan komunikasi yang menghubungkan aktivitas anggota-anggota organisasi (Bedeian dan Zammuto, 1991). Struktur merupakan kerangka di dalam organisasi bagaimana prinsip governance dapat dibagi, dijalankan dan dikendalikan. Struktur tata kelola didesain untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali. Penekanan terhadap pengendalian sangat penting karena tatakelola berkaitan dengan jawaban atas *who control whom* yang muncul dari pentingnya pemisahan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang mengontrol kepentingan (Syakhroza, 2008). Struktur tata kelola menggambarkan secara detail mengenai tingkat atau lapisan komite dan menggambarkan peran utamanya. Peran, akuntabilitas dan tanggungjawab yang setiap tingkat komite akan berbeda tergantung pada implementasinya dalam organisasi (Grant dkk, 2007). Sementara, mekanisme merupakan urutan kerja atau tatakkerja suatu organisasi (Kamus Bahasa Indonesia). Sedangkan prinsip merupakan nilai-nilai atau kebenaran umum atau individual yang dijadikan oleh organisasi sebagai pedoman untuk berfikir atau bertindak (Wikipedia.com).

Sementara, merujuk dokumen kebijakan GG Austrian Development Cooperation (2011), dalam rangka memfasilitasi manajemen, untuk mencapai good governance, ada faktor yang penting dijadikan acuan, yaitu prinsip dan sektor intervensi. Berikut adalah model good governance yang dikembangkan oleh Austrian Development Cooperation.



Gambar 1: Model Good Governance’s Australian Development Cooperation

Berdasarkan gambar di atas, bahwa secara jelas bahwa good governance atau tata kelola yang baik terdapat 4 (empat) parameter, yaitu (1) partisipasi, kepemilikan dan pemberdayaan; (2) transparansi/keterbukaan dan pertanggungjawaban; (3) pencegahan timbulnya konflik; dan (4) adanya tindakan anti-korupsi. Masing-masing parameter tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a) Partisipasi, kepemilikan dan penggalakan

Partisipasi bermakna mengembangkan dan mengimplementasikan aktivitas atau kegiatan secara bersama-sama dan berdasarkan kesadaran bahwa partisipasi aktif kelompok. Partisipasi yang baik dalam tata kelola yang baik adalah dengan cara melibatkan semua stakeholder organisasi dan di dukung proses pengambilan keputusan yang transparan. Dengan transparansi, maka tata kelola dapat dilaksanakan secara baik. Sementara, kepemilikan (ownership) bermakna menanamkan kepada setiap individu kepada organisasi agar mereka dapat secara aktif dalam ambil bagian dalam pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, semua program harus dilakukan secara transparan bagi semua pihak, hal ini merupakan kunci menjadikan individu bersifat ownership dan partisipasi. Sedangkan, pemberdayaan adalah proses memperdayakan kepada pihak-pihak yang kurang berpartisipasi dan rasa memiliki sangat kurang. Dalam konteks ini, manajemen harus mampu melakukan negosiasi kepada individu yang ada dalam kelompok kurang beruntung ini agar dapat diberdayakan

b) Transparansi dan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban bermakna adanya tuntutan keterbukaan atau transparansi dan mampu memberikan pelayanan yang efektif. Organisasi harus mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk memfasilitasi fungsi kontrol. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan atau proyek untuk memperkuat kerangka kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya.

c) Pencegahan Konflik

Dalam suatu organisasi manapun, faktor politik dapat dipastikan ada, meskipun intensitas tidak sama. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mempertimbangkan potensi konflik dan sekaligus mengintrasikan ke dalam program-program organisasi, agar pencegahan konflik dapat diidentifikasi sejak dini.

d) Anti-Korupsi

Dalam tata kelola organisasi yang baik, korupsi harus dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari tanggungjawab dan mengambil keuntungan dari kekuasaan untuk tujuan individu atau golongan. Korupsi merupakan gejala pemerintahan atau organisasi yang buruk. Oleh sebab itu, dalam rangka menerapkan tata kelola organisasi/pemerintah yang baik harus ditegaskan perilaku anti-korupsi, dan memasukkan unsur-unsur anti-korupsi ke dalam perjanjian, kriteria kualitas dalam berbagai level manajemen.

Istilah GG di Indonesia mulai ramai dibicarakan orang atau penyelenggaraan pemerintah sejak era reformasi tahun 1998. Sejak reformasi tersebut, terjadi perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, terutama koreksi terhadap semangat pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sehingga banyak disuarakan oleh berbagai kalangan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintah secara baik. GG merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pelayanan dan administrasi publik. Masyarakat Indonesia sejak tahun 1998-an menuntut penyelenggara pemerintahan melaksanakan GG atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari aspek fungsional, GG dapat dilihat dari sisi, apakah penyelenggara pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah “*governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi.

Menurut Leach & Percy-Smith (2001) *government* mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan.

Agar mudah dipahami, penulis menyimpulkan bahwa *governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan tersebut apakah terimplementasi atau tidak terimplementasi oleh pembuat kebijakan.

University governance adalah merupakan sebuah bentuk dan proses konstitusional ketika universitas mengatur urusannya sendiri (Shattock, 2006). *Governance* yaitu cara dimana kekuasaan atau otoritas digunakan organisasi dalam mengalokasikan dan mengelola sumberdaya. *Governance* melibatkan kebijakan dan prosedur untuk pengambilan keputusan dan pengendalian atas pengarahan dan pengelolaan organisasi agar efektif (Carnegie, 2009).

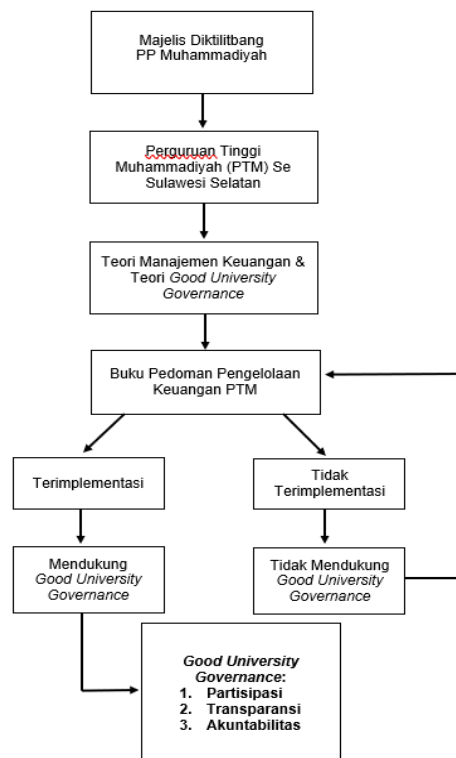
Penelitian Tedahulu

Pembahasan ini penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Judul penelitian ini merupakan upaya untuk melanjutkan penelitian sebelumnya namun bukan dalam konteks meniru melainkan dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya.

- 1) Rosyid (2014) Survey atas Implementasi *Good University Governance* (Studi Kasus STAIN Pekalongan). Hasil rerata grand total implementasi prinsip *Good University Governance* (akuntabilitas dan responsiveness) budaya akademik, mutu pelayanan akademik serta prakarsa sivitas akademik di STAIN Pekalongan secara berurutan berada pada angka 9, 7.34, 9.11, 8.74, dan 9.89. Hal ini berarti implementasi kelima dimensi penelitian yang diuji berada pada tingkat sedang.
- 2) Rudiawie dkk (2018) Analisis Penerapan *Good University Governance* Pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura. Penerapan GUG pada perguruan tinggi kota Jayapura masuk kedalam kriteria “Tinggi” dengan total skor 79,19 yaitu masuk pada interval 60,00-80,00. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa penerapan GUG pada perguruan tinggi di kota Jayapura sudah dilaksanakan dengan baik. Sumber utama dinamika di universitas lama adalah aktivitas independen staf akademik, sedangkan di universitas baru, sumber dinamika di utama adalah manajer lembaga-lembaga ini. Belum jelas apakah universitas-universitas baru dapat, dalam bidang kegiatan utama, meniru prestasi yang lama. Tata kelola yang efektif kemungkinan besar akan diamankan ketika bagian-bagian pokok organisasi ada dalam ketegangan kreatif; dan ini bisa berarti perlunya lebih sedikit kontrol eksternal, tidak lebih.
- 3) Deborah Blackman, Monica Kennedy (2009), *Knowledge management and effective university governance*. Makalah ini menggambarkan bahwa tata kelola yang efektif dan keberhasilan strategis tergantung pada kegiatan manipulasi pengetahuan yang tepat. Para penulis menyimpulkan bahwa dalam contoh kasus, jenis-jenis pengetahuan yang ditargetkan sempit dan anggota komite berfokus pada proses yang tidak secara efektif memungkinkan penciptaan atau transfer pengetahuan.
- 4) Sakchai Jarernsiripornkul dan I.M. Pandey (2018), *Governance of autonomous universities: case of Thailand*. Para penulis menemukan bahwa universitas otonomi Thailand memiliki tingkat kesiapan yang berbeda ketika mereka diberikan status otonomi oleh pemerintah. Menurut UU mereka, universitas dapat menentukan pola tata kelola mereka sendiri, rekrutmen kepemimpinan, manajemen pendapatan, penganggaran dan manajemen personalia. Dengan memperkuat peran dan akuntabilitas, dewan universitas telah menikmati ruang tindakan yang lebih luas dalam tata kelola kelembagaan. Ukuran dan komposisi dewan berbeda. Universitas besar dan lebih dewasa cenderung memiliki lebih banyak anggota dan dewan mereka terdiri lebih dari para ahli luar daripada yang kecil. Struktur tata kelola universitas otonom Thailand berada dalam pola struktur seperti perusahaan. Proses partisipatif diterapkan dalam pengambilan keputusan universitas. Universitas besar secara strategis diarahkan menjadi universitas riset, sementara universitas kecil dan yang baru didirikan berusaha untuk memperluas pendidikan ilmu kesehatan. Dalam tata kelola akademik, ada dewan akademik yang membantu dewan untuk menangani standar akademik dan memberikan rekomendasi terkait akademik. Peluncuran Kriteria Pendidikan untuk Kerangka Keunggulan Kinerja untuk membakukan sistem pendidikan tinggi di negara itu telah menjadi kontroversial dan dikatakan mengurangi tingkat kebebasan akademik universitas. Dalam otonomi keuangan, studi ini menemukan bahwa sebagian besar universitas masih tergantung pada anggaran pemerintah.

- 5) Sabine Lauer, Uwe Wilkesmann (2018), *The governance of organizational learning - empirical evidence from best-practice universities in Germany*. Pembelajaran organisasi di universitas dimungkinkan. Kedua kasus menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi tidak hanya terjadi dalam bentuk penyesuaian sederhana dalam hal pembelajaran loop tunggal tetapi pembelajaran loop ganda juga dapat terjadi, dipandu oleh berbagai bentuk tata kelola. Kedua universitas kasus mengubah tujuan mereka untuk menurunkan angka drop-out dengan bergeser dari pendekatan yang kurang berfokus pada guru ke pendekatan yang lebih berfokus pada siswa untuk mengajar di seluruh organisasi; dengan kata lain, mengubah maksud dari proses pembelajaran organisasi dari pembelajaran satu putaran menjadi pembelajaran dua putaran.
- 6) Bernard ect (2018), *Strengthening university governance in sub-Sahara Africa: the Ghanaian perspective*. Studi ini mengkaji isu-isu tata kelola utama seperti pendanaan, akuntabilitas, infrastruktur, kepercayaan, dan regulasi.
- 7) Taufikul Ichsan ect (2014), *Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi Pengelola Kota Depok*, memiliki komitmen kuat terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan taat terhadap kaidah manajemen pemerintahan daerah.
- 8) Taufeni Taufik dan Dian Kemala (2013), *Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik*. Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja sektor publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kerangka Pikir



3. METODE

a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se Sulawesi Selatan dengan jumlah sampel yaitu 5 PTM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengelolaan Keuangan di PTM berdasarkan Buku Pedoman Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dalam mendukung pelaksanaan *Good University Governance*.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Ada 5 PTM yang telah diteliti oleh peneliti yaitu STKIP Muhammadiyah Bulukumba, IAIM Muhammadiyah Sinjai, STISIP Muhammadiyah Sidrap, STIKES Muhammadiyah Sidrap, dan STIEM Muhammadiyah Palopo. Waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember 2019.

c. Unit Analisis dan Penentuan Informan

- 1) Subjek Penelitian ini adalah pengelolaan laporan keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas laporan keuangan dalam mewujudkan *Good University Governance*.
- 2) Informan adalah Ketua dan wakil ketua bagian keuangan STKIP Muhammadiyah Bulukumba, Rektor dan Warek 2 IAIM Muhammadiyah Sinjai, Ketua dan wakil ketua bagian keuangan STISIP Muhammadiyah Sidrap, Ketua dan wakil ketua bagian keuangan STIKES Muhammadiyah Sidrap, serta Ketua dan wakil ketua bagian keuangan STIEM Muhammadiyah Palopo. Alasan dipilihnya informan tersebut karena peneliti meyakini bahwa informan tersebut dapat memberikan data dan informasi yang lebih dalam terhadap apa yang menjadi kebutuhan peneliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan dengan cara melakukan wawancara kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang telah dipilih oleh peneliti.

e. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah sebuah prosedur pengumpulan data untuk memudahkan peneliti dalam menyimpulkan atau menafsirkan hasil penelitiannya. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1992 : 19-20) ada tiga alur kegiatan yang dilakukan dalam model analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari ketiga alur tersebut, berikut penjelasannya :

1) Reduksi Data

Pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemberian fokus terhadap hal yang dianggap penting dengan memperbaharui data-data kasar yang ditemui selama meneliti agar dapat menentukan informasi sesuai permasalahan penelitian. Data yang tereduksi akan memberi gambaran secara jelas sehingga peneliti dimudahkan dalam melakukan pengumpulan data berikutnya jika perlu.

2) Penyajian Data

Pada tahapan ini merupakan susunan informasi yang terorganisir yang mudah dipahami dan memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari metode analisis ini merupakan tinjauan kembali pada data atau informasi yang diperoleh dari penelitian sehingga kesimpulan yang dibuat teruji kebenarannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Berdasarkan Teori Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Jumasse Basra, M.si selaku Ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba mengatakan bahwa :

“Kami telah memiliki buku pedoman pengelolaan keuangan dari Majelis Pendidikan Tinggi penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan isinya memuat pedoman teknis pengelolaan keuangan yang menurut kami sudah lengkap”. (wawancara hari Jumat, 06 Desember 2019).

Pernyataan ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba tersebut diperkuat oleh Ibu Yuli Artati., S.E.,M.M yang menjabat sebagai wakil ketua 2 yang membidani keuangan mengatakan bahwa:

“Buku tersebut memang telah kami miliki yang kami terima dari Pimpinan Pusat Majelis Pendidikan Tinggi penelitian dan pengembangan, buku itu sudah sangat rinci dalam memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan”. (wawancara hari Jumat, 06 Desember 2019).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Dr. Firdaus, M.Ag selaku Rektor IAIM Muhammadiyah Sinjai dan dari wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“IAIM memiliki pedoman keuangan yang diberikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah berupa buku pedoman pengelolaan keuangan. Ada 1 buku, dan buku itu sangat bagus dan sudah rinci mulai dari bagaimana menyusun anggaran sampai pada pengelolaan anggaran, Kas, pembuatan neraca, koding dll”. (wawancara hari selasa, 15 Oktober 2019)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Dr. Ismail Hasan, M.Ag selaku wakil Rektor 2 IAIM yang membidani SDM dan Keuangan mengatakan bahwa:

“Memang betul kami telah memiliki Buku Pedoman tersebut, dan menurut kami buku itu sangat membantu kami dalam hal pencatatan laporan keuangan secara terperinci”. (wawancara hari selasa, 15 Oktober 2019)

Beberapa hari sebelumnya penulis juga telah melakukan wawancara dengan bapak Dr. Jamaluddin Ahmad, M.Si selaku ketua STISIP Muhammadiyah Sidrap yang mengatakan bahwa:

“STISIP pernah mendapatkan buku mengenai pedoman laporan keuangan dari Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, menurut kami sudah bagus namun operasionalnya masih konvensional karena belum memuat aplikasi berbasis IT”. (wawancara hari Sabtu, 12 Oktober 2019)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua 2 yang membidani Keuangan yaitu ibu Hj. Andi Astina, S.S., S.Pd., M.Si mengatakan bahwa:

“Iya, kami pernah diberi sebuah buku pedoman pengelolaan Keuangan dari Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan itulah yang kami pedomani namun operasionalnya kami tetap menggunakan sebuah aplikasi berbasis IT yang dibuat sendiri oleh bagian IT kampus guna melancarkan penghitungan gaji, pembayaran mahasiswa, dan penginputan akun-akun pemasukan dari sumber lain”. (wawancara hari Sabtu, 12 Oktober 2019)

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap yaitu bapak Drg. Bambang Roesmono, MM yang mengatakan bahwa:

“Buku pedoman pengelolaan keuangan sudah ada dan kami sudah menerapkan sesuai petunjuk buku tersebut” (Wawancara hari sabtu 12 Oktober 2019)

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh bapak Drs. Abdul Hayat Fattah, M.Kes selaku wakil ketua 2 STIKES Muhammadiyah Sidrap yang menyatakan bahwa:

“Kami telah memiliki buku pedoman pengelolaan keuangan dari Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah dan kami sudah pernah mengikuti Bimtek terkait buku tersebut.” (Wawancara hari sabtu 12 Oktober 2019)

Begitupula yang disampaikan oleh Ketua STIE Muhammadiyah Palopo yakni Bapak Dr. Salju, SE.,MM yang mengatakan bahwa :

“Pedoman pengelolaan keuangan yang didistribusikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah sudah tersistem dengan baik meskipun belum seutuhnya karena masih bergantung kepada kemampuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengaplikasikannya, yakni mengenai kemampuan SDM” (Wawancara hari senin 14 Oktober 2019)

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Wakil ketua 2 yaitu bapak Dr. Antong, SE.,M.Si yang mengatakan bahwa:

“Buku pedoman tersebut telah ada dan telah kami pedomani sesuai sebagaimana arahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah” (Wawancara hari senin 14 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari pimpinan kampus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa semua PTM yang ada di Sulawesi Selatan telah memiliki buku pedoman pengelolaan keuangan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meskipun secara teknis dalam proses pengelolaan keuangan belum mampu maksimal karena beberapa kendala yang ada, seperti kurangnya SDM yang sesuai basic keilmuan akuntansi pada masing-masing PTM, masih kurangnya Bimbingan Teknis dari Majelis Diktilitbang kepada PTM di Sulsel, dan belum

adanya sistem Informasi keuangan berbasis teknologi (aplikasi) sehingga masing-masing kampus mencari dan membuat sendiri aplikasi.

b. Penerapan Konsep *Good University Governance (GUG)* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Wakil Rektor 2 IAIM sinjai bapak Dr. Ismail Hasan, M.Ag terkait laporan pertanggungjawaban dan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: “proses penyusunan anggaran melibatkan bendahara dan wakil rektor yang membidani keuangan dalam hal ini saya sendiri selaku wakil rektor 2.” (Wawancara hari senin 15 Oktober 2019)

Wawancara lainnya yaitu dilakukan kepada ketua STKIP Bulukumba bapak Drs. Jumasse Basra, M.si terkait laporan pertanggungjawaban dan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: “Proses penyusunan anggaran melibatkan bendahara dan wakil ketua yang membidani keuangan. Namun yang sering menghambat kami adalah fungsi penempatan. penyebabnya adalah banyak pos-pos anggaran yang sudah ditempatkan namun mengalami perubahan dan pergeseran” (Wawancara hari senin 15 Oktober 2019)

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Ketua STISIP Muhammadiyah Sidrap bapak Dr. Jamaluddin Ahmad, M.Si terkait laporan pertanggungjawaban dan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

“Dalam penyusunan laporan kami melibatkan bendahara dan wakil ketua yang membidani keuangan. Namun yang sering menghambat kami adalah fungsi penempatan. penyebabnya adalah banyak pos-pos anggaran yang sudah ditempatkan namun mengalami perubahan dan pergeseran” (Wawancara hari senin 12 Oktober 2019)

Hal serupa ditanyakan kepada ketua Stikes Muhammadiyah Sidrap bapak Drg. Bambang Roesmono, MM terkait laporan pertanggungjawaban dan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

“laporan pertanggungjawabannya diselesaikan tepat waktu sesuai dengan limit waktu yang diberikan dan alhamdulillah laporannya diterima oleh PWM kaena proses penyusunan anggaran melibatkan bendahara dan wakil rektor yang membidani keuangan dalam hal ini saya sendiri selaku wakil rektor 2. Namun yang sering menghambat kami adalah fungsi penempatan. penyebabnya adalah banyak pos-pos anggaran yang sudah ditempatkan namun mengalami perubahan dan pergeseran” (Wawancara hari senin 12 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba Bapak Drs. Jumase Basra mengatakan bahwa:

“Kami memiliki Sistem Pengelolaan keuangan yang dapat diakses oleh publik dengan bantuan teknologi informasi sebagai bentuk transparansi kami dalam mengelola keuangan perguruan Tinggi”. (wawancara hari Jumat, 06 Desember 2019).

Hal senada disampaikan oleh Rektor IAIM Sinjai Bapak Dr. Firdaus, M.Ag mengatakan bahwa:

“Informasi laporan keuangan IAIM dapat diakses oleh siapa saja, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan karena kami telah membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan kualifikasi Magister Akuntansi dan Magister Ekonomi.” (wawancara hari selasa, 15 Oktober 2019).

Wawancara juga dilakukan bersama dengan Ketua STISIP Muhammadiyah Rappang Bapak Dr. Jamaluddin Ahmad, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Di STISIP Muhammadiyah Rappang sangat menganut prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan, hal itu ditandai dengan akses informasi yang bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat umum lewat media berbasis aplikasi”. (wawancara hari Sabtu, 12 Oktober 2019).

Sedangkan menurut ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap Bapak Drg. Bambang Roesmono, MM yang mengatakan bahwa:

“kami sangat transparan dalam mengelola keuangan dengan menampilkannya pada media yang bisa dilihat oleh masyarakat secara umum”. (wawancara hari Sabtu, 12 Oktober 2019).

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua STIE Muhammadiyah Palopo bapak Dr. Salju, SE.,MM mengatakan bahwa :

“kami menganut sistem transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga informasi mengenai laporan keuangan dapat kami pertanggungjawabkan dihadapan para stakeholder.” (Wawancara hari senin 14 Oktober 2019).

Berdasarkan beberapa hal di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu indikator dari *good governance* yakni transparansi kaitannya dengan laporan keuangan pada perguruan tinggi Muhammadiyah sudah diterapkan dengan baik oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diteliti yakni yang berjumlah 5 PTM. Prinsip Transparansi dalam mengelola keuangan menjadi sangat diperhatikan oleh ke 5 PTM tersebut. Hal ini berarti bahwa proses pengelolaan secara transparan sudah berjalan dengan sangat bagus.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua STISIP Muhammadiyah Sidrap yakni bapak Dr. Jamaluddin Ahmad, M.Si mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan kami susun sesuai standar transparansi, dan akuntabel, sebagai contoh bahwa proses keluar masuknya uang itu harus sepengetahuan ketua dan BPH” (wawancara hari Sabtu, 12 Oktober 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap yakni bapak Drg. Bambang Roesmono, MM yang mengatakan bahwa:

“setiap saat kami melaksanakan audit baik dilakukan oleh internal maupun audit eksternal, oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas pada kampus kami sudah sangat terjaga dan kami akan komitmen akan hal itu” (Wawancara hari Sabtu 12 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu indikator dari *good university governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari sistem control yang telah dibuat oleh majelis dikti PP Muhammadiyah dalam hal ini yaitu dengan diterbitkannya buku pedoman pengelolaan keuangan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang di dalamnya memuat petunjuk-petunjuk prinsip maupun teknis berkaitan dengan laporan keuangan.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan perguruan tinggi Muhammadiyah di dalamnya juga berisi prinsip-prinsip *good governance*, sehingga dengan dipedomannya buku tersebut maka secara otomatis perguruan tinggi Muhammadiyah juga telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

c. Upaya PTM untuk menerapkan GUG Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Majelis DIKTI LITBANG PP Muhammadiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan salah satu unggulan amal usaha Muhammadiyah yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. PTM dalam kontribusinya dalam dunia pendidikan tinggi harus bersaing dengan Perguruan Tinggi (PT) lain, baik negeri maupun swasta, yang semakin bertumbuh kembang. Agar dapat menjadi PT yang unggul dan memenangkan persaingan, PTM perlu terus berbenah dan memperbaiki diri, termasuk dalam hal tata kelola PT (*university governance*). Peningkatan kualitas unsur-unsur PT harus didukung dengan sistem tata kelola yang baik (Djanali, 2005).

Perlu ada upaya yang serius oleh para pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk menerapkan konsep GUG di perguruan Tinggi yang mereka pimpin. Upaya yang dimaksud adalah sebuah langkah kongkrit dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perguruan tinggi baik dari segi akademik, kemahasiswaan, sampai kepada pengelolaan keuangan.

Hasil wawancara dengan para pimpinan PTM di Sulawesi Selatan memang menunjukkan adanya upaya tersebut. Seperti wawancara yang kami lakukan kepada Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai bapak Dr. Firdaus, M.Ag yang mengatakan bahwa:

“Sebagai komitmen kami untuk menerapkan prinsip-prinsip GUG dalam hal ini adalah transparansi dan akuntabilitas, maka kami telah membentuk SPI yaitu Satuan Pengawasan Internal khusus untuk mengaudit keuangan internal, dan juga kami memakai jasa audit eksternal sebagai pembanding yang bersifat lebih objektif” (wawancara hari Selasa, 15 Oktober 2019).

Lebih lanjut Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai mengatakan bahwa:

“Setiap proses lalulintas uang baik masuk maupun keluar, tidak boleh tanpa sepengetahuan Rektor dan Ketua BPH, juga dalam hal akuntabilitas kami meminta agar SPI yang sudah terbentuk melaksanakan tugas setiap 3 bulan sekali atau pun pada saat dibutuhkan, lalu hasil pekerjaan SPI kami kirimkan ke Pimpinan Pusat dan ditembuskan ke Pimpinan Wilayah” (wawancara hari Selasa, 15 Oktober 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai telah melakukan upaya-upaya untuk menerapkan konsep dan prinsip-prinsip GUG di perguruan Tinggi yang ia pimpin.

Hasil wawancara lainnya yaitu kepada bapak Dr. Salju, SE.,MM selaku Ketua STIE Muhammadiyah Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan konsep dan prinsip-prinsip GUG di kampus kami dengan berpedoman kepada buku pedoman yang diberikan oleh majelis dikti PP Muhammadiyah, selain itu kami juga aktif melakukan audit keuangan internal maupun eksternal untuk menjamin jalannya akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud” (Wawancara hari senin 14 Oktober 2019)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua STIE Muhammadiyah Palopo, dapat disimpulkan bahwa STIE Muhammadiyah Palopo juga telah berupaya untuk menerapkan konsep GUG sebagaimana halnya pedoman pengelolaan keuangan yang telah diberikan oleh Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.

Temuan lainnya yaitu berdasarkan wawancara dengan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap yakni bapak Drg. Bambang Roesmono, MM yang mengatakan bahwa:

“Tahun ini semua transaksi keuangan kami telah menggunakan aplikasi sehingga pencatatan dan transaksi keuangan begitu sangat transparan dan akuntabel, hal ini kami lakukan sebagai upaya kami untuk menerapkan prinsip-prinsip laporan keuangan yang sehat (GUG)” (Wawancara hari sabtu 12 Oktober 2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap, dapat disimpulkan bahwa perguruan Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Sidrap juga telah memiliki upaya yang serius dalam rangka menerapkan konsep GUG yang berdasar kepada buku pengelolaan keuangan dari Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.

Penjelasan lain didapatkan melalui wawancara dengan Ketua STISIP Muhammadiyah Rappang yakni bapak Dr. Jamaluddin Ahmad, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Upaya kami untuk menerapkan konsep GUG telah ada yakni dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan menggunakan basis Teknologi sehingga setiap transaksi akan terkontrol dan terekam melalui aplikasi.” (wawancara hari Sabtu, 12 Oktober 2019)

Berdasarkan penjelasan Ketua STISIP Muhammadiyah Sidrap, dapat disimpulkan bahwa perguruan Tinggi STISIP Muhammadiyah Sidrap juga telah memiliki upaya yang serius dalam rangka menerapkan konsep GUG yang tentunya tetap berdasar kepada buku pengelolaan keuangan dari Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.

Wawancara terakhir yaitu kepada Ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba yaitu bapak Drs. Jumasse Basra, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Iya kami berkomitmen dan berupaya untuk melaksakan konsep GUG yakni transparansindan akuntabilitas pada kampus kami, salah satu upaya kami adalah dengan memperbaiki sistem transaksi pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel berdasar kepada buku pedoman pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah melalui Majelis Dikti litbang” (wawancara hari Jumat, 06 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh STKIP Muhammadiyah Bulukumba dalam menerapkan konsep GUG telah ada dan terus akan diupayakan oleh pimpinan kampus.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara dengan pelbagai pimpinan PTM yang ada di Sulawesi Selatan, penulis menyimpulkan bahwa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sulawesi Selatan telah ada upaya untuk menerapkan konsep dan prinsip-prinsip goog university governance atau tata kelola universitas yang baik. Tata kelola yang telah dijalankan dalam hal sistem pelaporan keuangan adalah bentuk komitmen dan tanggungjawab bagi semua pimpinan PTM yang ada di Sulawesi Selatan untuk berbenah dalam rangka memajukan perguruan tinggi yang mereka pimpin.

Kemajuan Perguruan tinggi Muhammadiyah ke depan akan lebih dinamis disebabkan seiring berjalan serta pesatnya kemajuan teknologi sehingga dalam hal pengelolaan atau tata kelola universitas yang baik akan semakin berkembang termasuk pengelolannya.

d. Hasil Penelitian dan Keterkaitan Dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil temuan dari penelitian ini yakni bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan Sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan kepada pedoman Pengelolaan Keuangan yang diterbitkan oleh Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.

Selain itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah menerapkan Prinsip-prinsip *Good University Governance* yakni dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah memiliki upaya yang maksimal untuk menerapkan Prinsip-prinsip *Good University Governance* yang disesuaikan dengan pedoman Pengelolaan Keuangan yang diterbitkan oleh Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosyid (2014) Survey atas Implementasi *Good University Governance* (Studi Kasus STAIN Pekalongan). Hasil rerata grand total implementasi prinsip *Good University Governance* (akuntabilitas dan responsiveness) budaya akademik, mutu pelayanan akademik serta prakarsa sivitas akademik di STAIN Pekalongan secara berurutan berada pada angka 9, 7.34, 9.11, 8.74, dan 9.89. Hal ini berarti implementasi kelima dimensi penelitian yang diuji berada pada tingkat sedang.

Tabel Reduksi Hasil Penelitian

Sumber Informasi	Partisipatif	Transparansi	Akuntabilitas	Kendala Utama
STKIP M Bulukumba	Terlibat semua fungsi keuangan	Tidak ada koreksi dalam pelaporan keuangan	Kadang terlambat	Kemampuan IT
IAI M Sinjai	Terlibat semua fungsi keuangan	Tidak ada koreksi dalam pelaporan keuangan	Kadang terlambat	Kemampuan SDM
STIEM Palopo	Terlibat semua fungsi keuangan	Tidak ada koreksi dalam pelaporan keuangan	Kadang terlambat	Kemampuan SDM dan IT
Stikes M Sidrap	Terlibat semua fungsi keuangan	Tidak ada koreksi dalam pelaporan keuangan	Kadang terlambat	Kemampuan SDM dan lambatnya pembayaran mahasiswa
STISIP M Sidrap	Terlibat semua fungsi keuangan	Tidak ada koreksi dalam pelaporan keuangan	Kadang terlambat	Kemampuan SDM dan lambatnya pembayaran mahasiswa

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini :

- a. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan Sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan beberapa Teori Manajemen (Pengelolaan Keuangan).
- b. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan telah memiliki upaya yang maksimal untuk menerapkan Prinsip-prinsip *Good University Governance* yang disesuaikan dengan pedoman Pengelolaan Keuangan yang diterbitkan oleh Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.
- c. Indikator partisipatif pada dasarnya sudah melibatkan semua fungsi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan.
- d. Indikator transparansi pada dasarnya sudah berjalan dengan tepat. Hal tersebut, ditunjukkan dengan tidak adanya koreksi dari pemeriksa atau pengawas dalam pengelolaan keuangan.

- e. Adapun indikator akuntabilitas tidak berjalan sepenuhnya karena beberapa kampus mengalami masalah kemampuan sumberdaya dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan IT sehingga terjadi keterlambatan pelaporan dan keterlambatan pertanggungjawaban.

6. REFERENSI

- Bernard B, Joseph Ato, 2018. *Strengthening university governance in sub-Saharan Africa: the Ghanaian perspective*. International Journal of Education Management, 32(4), 606-624.
- Brouwers, Rien and Koetzier, Wim 2015. *Basics of Financial Management. Third edition*. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten
- Leach, R. and Percy-Smith, J. (2001), *Local Governance in Britain*, Houndmills: Palgrave.
- Muktiyanto, Ali. (2016). *Good University Governance dan Kinerja Program Studi: Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik Manajemen dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai Model Mediasi Fit*. Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Depok.
- Mustari Mohammad, *Manajemen Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Rosyid. Dkk, 2014. *Survey atas Implementasi Good University Governance (Studi Kasus STAIN Pekalaongan)*. Jurnal Penelitian, IAIN Pekalongan, 11(1), 172-188.
- Sabine L, 2018. *The Governance of Organizational learning: Empirical evidence from best practice university in Germany*. The Learning Organization Vol 24 (5), 266-277.
- Sakchai J, 2018 *Governance of autonomous universities: case of Thailand*. Journal of Advances in Management Research, 15 (4).
- Shattock, M. (2006). *Managing Good Governance In Higher Education* McGraw Hill Education, UK.
- Senduk, Safir (2009). *Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Slamet. 2015. *Penilaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (Studi di Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum)*. Working Paper, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses www.academia.edu/20693571/penilaian_good_university_governance_pada_Perguruan_Tinggi_Negeri_Badan_Layanan_Umum_Studi_di_Perguruan_Tinggi_Badan_Layanan_Umum.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, 2013. *Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik*, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, 11(3) 161-168.
- Taufani. 2008. *Minat, Faktor-faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.